

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Kajian ini menjadi landasan konseptual dan empiris untuk membangun argumen ilmiah karena menunjukkan bagaimana suatu masalah telah dikaji, metode yang digunakan, dan temuan yang diperoleh. Melalui penelaahan tersebut, peneliti dapat menemukan kesenjangan penelitian, mengenali arah perkembangan tema, serta menentukan teori atau pendekatan yang relevan. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak sekedar rangkuman, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun argumen, menegaskan urgensi penelitian, dan memperkuat metodologi yang digunakan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Penelitian oleh Firza Cahyati (2020) berjudul “Analisis Tingkat Kerusakan Bencana Abrasi di Kabupaten Bengkalis”

Membahas tingkat kerusakan pantai akibat abrasi di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah menentukan tingkat kerusakan pantai dan menyusun prioritas strategi penanganannya. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis pembobotan semi-kualitatif dan spasial berbantuan ArgGIS, penelitian ini menilai sembilan parameter kerusakan pantai, seperti perubahan garis pantai dan kerusakan hutan mangrove.

Hasilnya menunjukkan bahwa kerusakan hutan mangrove menjadi prioritas utama penanganan, sementara perubahan garis pantai memerlukan intervensi lanjutan. Strategi yang disarankan meliputi penanaman mangrove, pembangunan pelindung pantai, dan pengendalian aktivitas masyarakat pesisir.

Persamaan penelitian (Cahyati, 2020) dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah abrasi pantai dan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mitigasi pesisir. Namun, penelitian ini berbeda dalam pendekatan. Firza menekankan analisis teknis dan ekologis untuk menilai tingkat kerusakan, sedangkan penelitian penulis berjudul “Analisis Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Abrasi Pantai di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu” menitikberatkan pada aspek kebijakan dan tata kelola kolaboratif antar lembaga dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008). Dengan demikian, penelitian Firza menjadi landasan empiris dalam memahami kondisi abrasi pantai, sedangkan penelitian ini memperluas kajian pada efektivitas kolaborasi pemerintah, PT Pelindo, dan masyarakat dalam penanganannya.

2. Penelitian oleh Kharisma Eka Deviyanti dan Bagus Nuari Harmawan (2023) berjudul “*Collaborative Governance* dalam Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak”

Membahas proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah

Perempuan dan Anak (KAS RPA) di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008), yang meliputi lima aspek utama kolaborasi, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin berjalan efektif karena adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelola RW, dan masyarakat sehingga program berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak (Deviyanti & Harmawan, 2023).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori *Collaborative Governance* dan fokus terhadap efektivitas kolaborasi antaraktor pemerintah dan masyarakat. Namun, perbedaannya terdapat pada konteks dan objek kajian. Deviyanti dan Harmawan (2023) meneliti kolaborasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan, sedangkan penelitian penulis berjudul “Analisis Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Abrasi Pantai di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu” menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu, dan masyarakat pesisir dalam menangani abrasi pantai. Dengan demikian, penelitian Deviyanti dan Harmawan menjadi landasan teoretis dan empiris yang memperkuat analisis tata kelola kolaboratif dalam konteks kebijakan lingkungan pesisir.

3. Penelitian oleh Sri Indarti dan Siska Julia Ahirah (2025) berjudul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma”

Membahas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi abrasi di wilayah pesisir Seluma. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan David C. Korten, penelitian ini menilai kesesuaian kebijakan, kinerja organisasi pelaksana, dan keterlibatan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terealisasinya program penanaman mangrove, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap upaya mitigasi abrasi (Indarti & Ahirah, 2025).

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus isu abrasi pantai dan pentingnya peran pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Indarti dan Ahirah menitikberatkan pada implementasi kebijakan secara administratif, sedangkan penelitian penulis berjudul “Analisis Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Abrasi Pantai di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu” menekankan pada tata kelola kolaboratif antaraktor, yaitu pemerintah, PT Pelindo (Persero), dan masyarakat, dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008). Dengan demikian, penelitian Indarti dan Ahirah menjadi landasan empiris dalam

memperkuat analisis kolaboratif dalam konteks penanganan abrasi di Pulau Baai Kota Bengkulu.

4. Penelitian oleh Theo Albino, Reflis, dan Satria Putra Utama (2025) berjudul “Analisis Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Sekitar Pulau Baai Kota Bengkulu”.

Penelitian tersebut berfokus pada kondisi kerusakan lingkungan pesisir, khususnya ekosistem mangrove di kawasan Pulau Baai yang mengalami tekanan akibat aktivitas pelabuhan dan industri. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan mangrove serta merumuskan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis SWOT sebagai alat perumusan strategi pengelolaan berbasis ekowisata ramah lingkungan.

Hasil penelitian (Albino et al., 2025) menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove di Pulau Baai disebabkan oleh berbagai faktor antropogenik, seperti abrasi pantai, alih fungsi lahan menjadi tambak dan kawasan industri, aktivitas pelabuhan yang intensif, penumpukan batu bara, serta pencemaran limbah rumah tangga. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakseimbangan struktur komunitas mangrove dan menurunnya fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung pantai, habitat biota laut, dan penyangga lingkungan pesisir.

Penelitian ini merekomendasikan rehabilitasi mangrove, pengelolaan limbah yang lebih ketat, serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata sebagai strategi menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir Pulau Baai. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Abrasi Pantai di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu”, terutama pada kesamaan lokasi penelitian dan isu utama yang dibahas, yaitu kerusakan lingkungan pesisir dan abrasi pantai.

Keduanya sama-sama menegaskan bahwa abrasi dan degradasi ekosistem pesisir di Pulau Baai tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia dan lemahnya pengelolaan lingkungan yang terintegrasi. Selain itu, kedua penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Perbedaan mendasar antara penelitian (Albino et al., 2025) dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan perspektif analisis.

Penelitian (Albino et al., 2025) menitikberatkan pada aspek ekologis dan lingkungan dengan fokus pada kerusakan ekosistem mangrove serta strategi pengelolaannya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek kelembagaan dan kebijakan publik, khususnya pada proses tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu, dan masyarakat pesisir dalam penanganan abrasi pantai. Penelitian penulis menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell

dan Gash (2008) untuk menganalisis pola interaksi, koordinasi, hambatan, dan hasil kolaborasi antaraktor dalam mitigasi abrasi.

Dengan demikian, penelitian (Albino et al., 2025) berperan sebagai landasan empiris yang memperkuat pemahaman mengenai dampak abrasi dan kerusakan lingkungan pesisir di Pulau Baai. Sementara itu, penelitian penulis melengkapi dan mengembangkan kajian tersebut dengan menyoroti bagaimana mekanisme tata kelola kolaboratif dapat menjadi solusi kebijakan dalam menangani abrasi pantai secara berkelanjutan. Perbedaan fokus ini menunjukkan adanya celah penelitian yang relevan, yaitu perlunya kajian yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan tata kelola kelembagaan dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Konsep Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*)

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan pendekatan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan cara tradisional dalam membuat dan menerapkan kebijakan. Tata kelola kolaboratif menyatukan pemangku kepentingan publik dan swasta dalam sebuah kelompok dengan lembaga-lembaga publik untuk membuat keputusan yang

bertujuan mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008).

Para ahli sering menggunakan istilah yang berbeda , tetapi semuanya memiliki arti yang sama. Misalnya *collaboration*, *participatory management*, *participatory governance*, *collaborative democracy*, *collaborative governance*, *sound governance* dan *collaborative management* semuanya digunakan untuk menggambarkan upaya di mana para pemangku kepentingan dan aktor non-negara bekerja sama untuk memecahkan masalah kompleks melalui pengambilan keputusan dan implementasi bersama.

Istilah-istilah ini terkadang digunakan secara bergantian dalam literatur, tetapi Ansell dan Gash (2008) lebih memilih "tata kelola kolaboratif" dari pada "manajemen" karena "tata kelola" lebih luas dan mencakup berbagai aspek. Menurut Agbodzakey, 2011 (dalam H, 2018:1) mengatakan bahwa "kolaboratif" lebih menunjukkan pendekatan pengambilan keputusan yang deliberatif dan berorientasi untuk mengambil keputusan.

Dalam teori dan praktik tata kelola kolaboratif , Ansell dan Gash (2008) mendefinisikannya sebagai:

"A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that

aims to make or implement public policy or manage public programs or assets."

Collaborative Governance adalah bentuk kontrol di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal. Proses ini didasarkan pada konsensus, diskusi, dan bertujuan untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik, atau menangani aset publik. Definisi ini mencakup enam kriteria:

1. forum tersebut diprakarsai oleh lembaga publik
2. pesertanya meliputi aktor non-negara
3. peserta terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya konsultasi
4. forum tersebut diselenggarakan secara resmi
5. forum tersebut bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus
6. fokus kolaborasi tersebut adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik

Penjelasannya adalah bahwa forum ini secara resmi diselenggarakan dan mengadakan pertemuan rutin, melibatkan lembaga publik, sektor swasta, aktor non-negara, dan masyarakat umum yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, bukan hanya konsultasi. Tata kelola kolaboratif dipandang sebagai salah satu cara

untuk menyelesaikan konflik sosial jangka panjang di antara berbagai pemangku kepentingan, dengan menciptakan rencana pembangunan lokal untuk perlindungan lingkungan melalui upaya mandiri yang kreatif, bijaksana, dan saling menguntungkan di antara para pemangku kepentingan Thomson dan Perry, 2006 dalam (H, 2018:2).

Menurut Ansell dan Gash yang memiliki 5 (lima) fokus dari proses kolaborasi, yakni:

1. Dialog tatap muka

Menurut Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka adalah tahap awal yang paling penting dalam membangun proses kolaboratif yang efektif. Melalui pertemuan langsung, setiap aktor dapat menyampaikan pandangan, kepentingan, dan hambatan yang dihadapi secara terbuka. Dalam konteks Pulau Baai, dialog tatap muka menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pihak seperti PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu, Pemerintah Daerah, dan instansi lingkungan hidup guna membahas solusi terhadap abrasi pantai dan pelabuhan yang semakin parah.

2. Membangun kepercayaan

Proses kolaboratif tidak dapat berjalan tanpa adanya kepercayaan antar pihak. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah elemen yang terbentuk melalui interaksi berulang, transparansi, dan konsistensi dalam tindakan.

3. Komitmen pada proses

Komitmen dalam proses kolaborasi berarti kesiapan dan kesediaan para aktor untuk berpartisipasi aktif serta menjalankan peran masing-masing secara konsisten (Ansell & Gash, 2008).

Komitmen yang kuat diperlukan agar proses kolaborasi tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret, seperti pembentukan tim koordinasi lintas sektor atau penyusunan rencana aksi bersama. Komitmen ini menjadi cerminan keseriusan semua pihak untuk mengatasi abrasi secara berkelanjutan dan tidak saling melempar tanggung jawab.

4. Pemahaman bersama

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa pemahaman bersama merupakan kondisi ketika seluruh aktor memiliki kesamaan persepsi mengenai masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses kolaborasi.

5. Hasil kolaborasi

Menurut Ansell dan Gash (2008), hasil kolaborasi merupakan dampak nyata yang dihasilkan dari proses kerja sama antar aktor. Hasil tersebut dapat berupa program, kebijakan, perubahan kondisi lingkungan, maupun perubahan perilaku masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, penulis memilih teori Ansell & Gash (2008) dalam konteks penanganan abrasi pantai di Pulau Baai, tata kelola kolaboratif menjadi relevan di karenakan teori ini terdiri dari 5 point proses kolaborasi yang di dalamnya sudah mencakup secara keseluruhan aspek yang di perlukan dalam tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif penting dalam permasalahan tersebut melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang berbeda. Menurut Astari et al., 2019 dalam (Deviyanti & Harmawan, 2023) kolaborasi pada dasarnya adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang mustahil untuk di laksanakan secara individu. Oleh sebab itu, koordinasi antara Pemerintah Daerah, PT Pelindo (Persero), dan instansi lingkungan merupakan wujud nyata penerapan prinsip *collaborative governance*.

2.2.2 Konsep Abrasi Pantai

Abrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses alam yang terjadi secara terus-menerus, dalam bidang geologi, kata abrasi digunakan untuk menjelaskan cara batuan tererosi oleh air, es, atau angin yang membawa dan menggerakkan partikel kecil. Dalam konteks historis, abrasi telah menjadi faktor yang signifikan dalam pembentukan garis pantai dan bentuk muka bumi. Erosi pantai merupakan suatu kondisi yang menyebabkan garis pantai bergeser mundur dari kedudukan semula dan agak menjorong lebih jauh ke dalam laut (Adam et al., 2020)

Abrasi adalah pengikisan batuan pantai yang disebabkan oleh pergerakan gelombang laut menuju pantai, yang lambat laun dapat mengikis bahkan memecah batu karang di sepanjang pantai (Kurniasih, 2023, hal. 2). Secara umum, pantai adalah area di mana daratan bertemu dengan lautan. Para ahli memiliki definisi yang lebih spesifik misalnya, Triatmodjo (1999) mendefinisikan garis pantai sebagai area sepanjang tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang surut tertinggi dan pasang surut terendah. Di sisi lain istilah wilayah pesisir mengacu pada wilayah yang lebih luas yang masih dipengaruhi oleh aktivitas laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air. Pakar lain, Yuwono (1992), mengartikan garis pantai sebagai garis batas antara daratan dan lautan, diukur dari titik tertinggi pasang surut sampai titik terendah surut, dan dipengaruhi oleh faktor fisik lautan maupun unsur sosial dan ekonomi.

Secara umum abrasi pantai merupakan proses pengikisan daratan oleh gelombang laut sehingga menyebabkan berkurangnya area pantai, rusaknya ekosistem pesisir, dan terancamnya aset infrastruktur maupun pemukiman masyarakat. Secara ilmiah, abrasi pantai menggambarkan suatu kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan antara gaya perusak dan gaya pembentuk pantai yang secara alami bekerja di wilayah pesisir. Ketidakseimbangan ini muncul saat proses hidrodinamika laut termasuk gelombang, arus sejajar pantai, dan pasang surut bekerja lebih dominan dibandingkan proses sedimentasi yang berfungsi menambah material daratan.

Dominasi dari energi gelombang dan arus membuat material sedimen yang tadinya menyusun garis pantai terangkat ke lautan, sehingga garis pantai mengalami penarikan mundur secara terus menerus. Peristiwa ini selanjutnya mengubah bentuk pantai, karena bagian-bagian yang terkikis tidak mendapatkan pasokan material secara alami. Fenomena ini mempengaruhi bentuk pantai, karena area yang terkikis tidak mendapatkan material pengganti secara alami. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab abrasi yaitu:

1. Faktor Oseanografi (Alam)

Energi dari ombak laut, aliran air yang sejajar garis pantai, serta naik turunnya air laut adalah penyebab utama terkikisnya daratan di tepi laut. Ombak besar memiliki kekuatan untuk membawa endapan ke tengah lautan, sehingga proses penumpukan dan pengikisan menjadi tidak seimbang. Semakin sering terjadi cuaca buruk dan semakin tingginya ombak karena perubahan iklim membuat abrasi semakin cepat di berbagai daerah tepi laut.

2. Dinamika Sedimen

Erosi pantai muncul ketika pasokan endapan lumpur dari sungai ataupun sumber-sumber alami lainnya menyusut. Pendirian bendungan, penertiban sungai, serta peralihan fungsi lahan di bagian hulu sungai menghalangi pergerakan endapan ke tepi laut, yang berakibat garis pantai kehilangan material pengganti yang seharusnya meredam energi ombak.

3. Kenaikan Muka Air Laut

Akibat pemanasan global, permukaan laut di seluruh dunia naik, mendorong garis pantai semakin ke arah darat. Situasi ini mengakibatkan perairan di dekat pantai menjadi lebih dalam, yang mana memperbesar kekuatan gelombang yang menghantam pantai. Dampaknya, abrasi menjadi lebih parah, baik secara struktur maupun dalam jangka waktu yang lama.

4. Kerusakan Ekosistem Pesisir

Kawasan pesisir secara alami dilindungi oleh ekosistem seperti hutan bakau, terumbu karang, serta hamparan lamun. Apabila ekosistem ini rusak atau beralih fungsi, pantai kehilangan daya redam alami terhadap hantaman gelombang. Akibatnya, pengikisan pantai pun terjadi lebih parah dan meluas.

5. Aktivitas Manusia di Wilayah Pesisir

Aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai, proyek reklamasi, pendirian pelabuhan, pembangunan pemecah ombak, serta pengembangan infrastruktur tepi laut yang kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan berpotensi mengubah arah aliran air dan penyebaran endapan lumpur. Tindakan ini kerap kali memicu pengikisan daratan di area yang berbeda karena adanya ketidakseimbangan pada ekosistem wilayah pesisir.

6. Perubahan Tata Guna Lahan Pesisir

Perubahan penggunaan lahan di pesisir untuk pemukiman, industri, dan pariwisata memberi dampak negatif pada lingkungan tepi laut. Hilangan vegetasi di tepi pantai mengakibatkan penurunan kestabilan tanah dan meningkatkan risiko kawasan terhadap erosi.

7. Faktor Geomorfologi Pantai

Karakteristik fisik dari pantai, seperti jenis bahan yang menyusunnya (pasir yang lembut, lumpur, atau kerikil), sudut kemiringan pantai, dan kontur garis pantai, berperan dalam menentukan sejauh mana kerentanan terhadap abrasi. Pantai dengan pasir lembut serta permukaan yang landai seringkali lebih mudah terpengaruh dibandingkan pantai yang berbatu.

2.2.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki karakteristik unik karena menjadi tempat bertemunya ekosistem darat dan laut serta menjadi ruang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir rentan terhadap berbagai tekanan, seperti abrasi pantai, pencemaran, dan konflik pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang maritim, perencanaan pesisir, kebijakan kelautan, dan kebijakan pesisir semuanya dapat belajar banyak dari pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Pendekatan perencanaan dan kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial ketika mengambil

keputusan tentang bagaimana menggunakan wilayah maritim (Barianaki et al., 2024).

Pengelolaan wilayah pesisir dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan sumber daya pesisir dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini menyoroti bahwa keberhasilan pengelolaan pesisir tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang sebelumnya untuk mengatur secara lebih rinci mengenai pengelolaan pesisir, serta pembagian kewenangan antara pemerintah, provinsi dan kabupaten atau kota.

Menurut (Gabriello & Katiandagho, 2020) Rencana strategis untuk pengelolaan sumber daya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil juga membutuhkan rencana pembangunan strategis untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah ini melalui infrastruktur yang memadai yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana. Perencanaan dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir ini mencakup empat aspek yaitu:

1. Keterpaduan wilayah ekologis

Secara geografis dan ekologis, daerah pesisir terhubung antara daratan dan laut lepas. Hal ini karena wilayah pesisir adalah tempat daratan bertemu dengan laut. Karena adanya keterkaitan ini, pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lingkungan di kedua wilayah tersebut. Dampak lingkungan di wilayah pesisir dan laut berasal dari aktivitas di darat seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, kawasan permukiman, dan lain-lain. Demikian pula, aktivitas di laut lepas seperti pengeboran minyak lepas pantai dan transportasi maritim juga menimbulkan dampak lingkungan.

2. Keterpaduan sektor

Terdapat banyak sumber daya yang berbeda di wilayah pesisir dan laut, banyak instansi dan sektor pelaku pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan pesisir dan laut. Setiap aktivitas di satu sektor tidak boleh menghentikan atau merugikan aktivitas sektor lainnya. Koordinasi antar sektor sangat penting, baik antar sektor yang berbeda maupun di dalam sektor yang sama. Oleh karena itu, perlu dibuat rencana tata ruang dan pedoman pembangunan untuk wilayah pesisir guna menghindari konflik antara berbagai kegiatan

3. Keterpaduan disiplin ilmu

Daerah pesisir dan laut memiliki karakteristik unik, baik dalam ekosistemnya maupun dalam aspek sosial dan budaya masyarakat

pesisirnya. Oleh karena itu, mempelajari wilayah pesisir dan laut membutuhkan lebih dari satu disiplin ilmu. Diperlukan berbagai bidang studi yang berbeda, masing-masing mendukung karakteristik spesifik lingkungan pesisir dan laut.

4. Keterpaduan Stakeholder

Agar semua koordinasi yang disebutkan di atas dapat berhasil dilaksanakan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan para pengelola yang terlibat dalam pembangunan di wilayah pesisir dan maritim (pemangku kepentingan). Seperti diketahui umum, pihak-pihak dan pengelola yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan maritim meliputi pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pesisir, sektor swasta atau investor, serta organisasi non-pemerintah. Masing-masing kelompok ini memiliki kepentingan sendiri dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerah pesisir. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan terpadu harus mampu mempertimbangkan semua kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sumber daya pesisir dan maritim.

Pengelolaan wilayah pesisir melibatkan upaya terkoordinasi untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang kaya namun rentan, sekaligus melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup perencanaan, penggunaan sumber daya, perlindungan, dan pemulihan, misalnya dengan menanam

kembali hutan bakau, dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan abrasi pantai yang terjadi di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu yang semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan. Permasalahan ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, PT Pelindo (Persero), serta masyarakat pesisir, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan peran dari berbagai pihak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis proses penanganan abrasi pantai.

Tata kelola kolaboratif dipahami sebagai proses kerja sama antar aktor yang dilandasi oleh interaksi, komunikasi, dan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan yang sama. Mengacu pada teori Ansell dan Gash (2008), terdapat lima indikator utama yang digunakan untuk menganalisis proses kolaborasi, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil kolaborasi.

Dialog tatap muka menjadi tahap awal yang penting dalam mempertemukan para aktor untuk membahas permasalahan abrasi secara terbuka. Selanjutnya, proses membangun kepercayaan diperlukan agar

hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Komitmen pada proses menunjukkan sejauh mana para pihak memiliki keseriusan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan. Selain itu, pemahaman bersama menjadi faktor penting dalam menyatukan persepsi terkait penyebab, dampak, dan solusi terhadap abrasi pantai. Dengan adanya kesamaan pandangan, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Tahap akhir dari proses kolaborasi adalah hasil kolaborasi, yang mencerminkan output nyata dari kerja sama yang telah dilakukan, baik berupa kebijakan, program, maupun perubahan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat pesisir.

Melalui kelima indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tata kelola kolaboratif telah diterapkan dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berupa model kolaborasi yang efektif antara pemerintah, PT Pelindo, dan masyarakat dalam menangani abrasi pantai secara berkelanjutan dan partisipatif

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

